

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

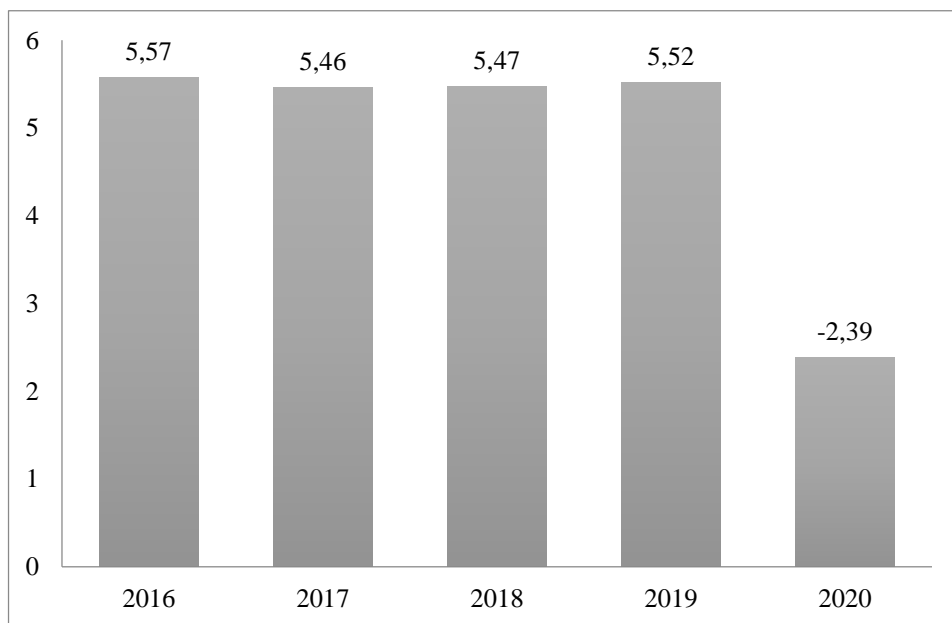
Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kegiatan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa yang digunakan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi atau *Economic Growth* dapat digunakan untuk mengukur perkembangan kondisi perekonomian suatu negara.² Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, negara dapat mengetahui manfaat dari pembangunan yang dilakukan dalam menunjang kegiatan perekonomian. Ketika negara mengetahui kondisi perekonomiannya, maka akan dengan mudah untuk menentukan langkah atau kebijakan apa saja yang harus ditempuh oleh pemerintah guna meningkatkan atau memperbaiki kondisi perekonomian yang terjadi. Meningkatnya kondisi perekonomian suatu negara berarti menunjukkan bahwa tujuan pembangunan yang dilakukan telah berhasil.

Keadaan perekonomian suatu negara tentu saja ditunjang oleh keadaan perekonomian setiap daerahnya. Seperti keadaan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang dipengaruhi oleh 34 provinsi yang dimiliki. Setiap provinsi memberikan pengaruh yang berbeda-beda pada keadaan

² Rinaldi Syahputra, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol.1 No.2 Tahun 2017, hlm.183

perekonomian nasional.³ Pengaruh yang berbeda dikarenakan kondisi perekonomian suatu daerah tidaklah sama. Kondisi pembangunan infrastruktur secara fisik merupakan hal utama yang mempengaruhi kondisi perekonomian. Dengan demikian pemerintah harus memperhatikan kondisi pembangunan suatu daerah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Seperti halnya perekonomian yang terdapat di salah satu provinsi di Indonesia yaitu Jawa Timur yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi berbedabeda setiap tahun. Berikut ini adalah diagram laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur:

Diagram 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur tahun 2016-2020



Sumber: Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto, 2021.⁴

³ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, “*Artikel Pembangunan & Pertumbuhan Ekonomi*” <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/artikel-pembangunan-pertumbuhan-ekonomi-53>, diakses pada Minggu 12 Desember 2021 pukul 10.00 WIB

⁴ Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi di Indonesia (persen), 2016-2020, dalam <http://satudata.sumselprov.go.id>, diakses 29 November 2021

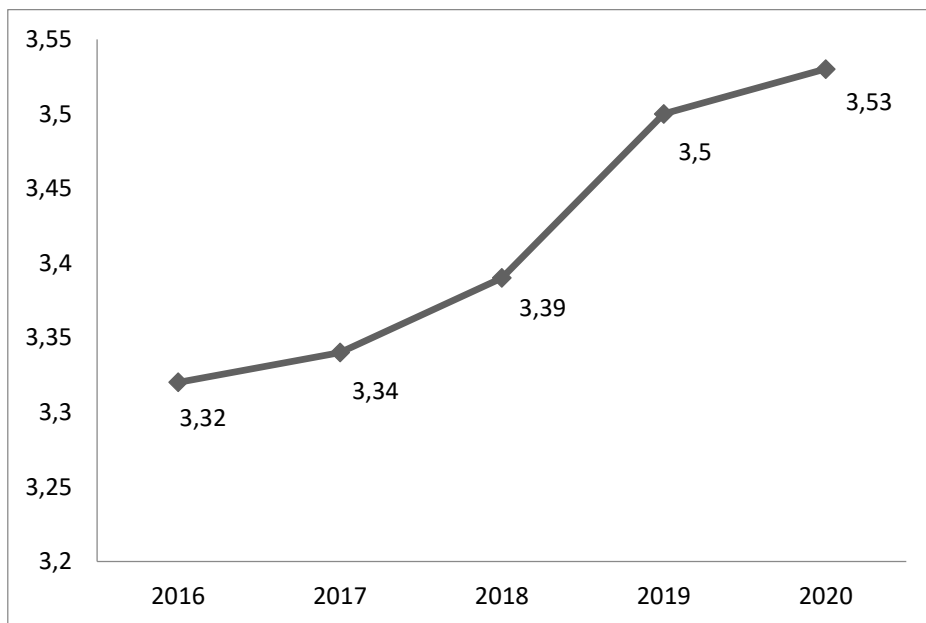
Berdasarkan diagram 1.1 tentang laju pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan oleh produk domestik regional bruto yang didapatkan dari data Provinsi Jawa Timur. Dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami kesetabilan dari tahun 2016-2019, akan tetapi untuk tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat tajam dikarenakan adanya pandemi yang sedang berlangsung. Semakin tinggi nilai laju pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan semakin besar tingkat keberhasilan suatu daerah dalam melakukan pembangunan perekonomiannya. Hal tersebut secara langsung menandakan bahwa kemakmuran daerah tersebut juga meningkat. Laju pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain desentralisasi fiskal, pendapatan asli daerah, kinerja keuangan, dan dana alokasi umum.

Desentralisasi fiskal merupakan kegiatan otonomi daerah dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan secara penuh dalam mengatur keuangan daerahnya. Dalam arti lain dapat dikatakan sebagai pengalihan tanggung jawab pemerintah dengan tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah dengan tingkat yang lebih rendah untuk mengatur kegiatan keuangannya sendiri.⁵ Keuangan yang dimaksud adalah dalam hal penerimaan anggaran serta membelanjakan anggaran. Penerimaan anggaran pemerintah daerah berasal dari pemerintah pusat dengan jumlah yang sudah ditentukan selain itu pemerintah daerah juga mendapatkan

⁵ Sang Made Muryawan and Made Sukarsa, 'Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, Dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali', *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 2 (2016), Hlm.233.

anggaran dari sumber pendapatan-pendapatan yang berasal dari daerah tersebut. Sedangkan pengeluaran untuk pembelanjaan digubakan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan aktivitas perkonomian daerahnya sendiri. Berikut ini adalah grafik desentralisasi fiskal di Jawa timur:

Grafik 1.1
Nilai Rata-Rata Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 2016-2020



Sumber: Direktor Jendral Perimbangan Kementrian Keuangan (DJPKK),2021.

Berdasarkan grafik 1.1 tentang desentralisasi fiskal di Jawa Timur tahun 2016-2020 diketahui bahwa nilai desentralisasi fiskal mengalami peningkatan setiap tahunnya. Desentralisasi fiskal tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 3,53 sedangkan terendah pada tahun 2016 sebesar 3,32. Meningkatnya desentralisasi fiskal menunjukan besarnya kontrol keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya.

Keadaan tersebut akan menjadikan oknum pemerintah dapat melakukan hal kecurangan dalam mengelola anggaran. Berdasarkan penelitian Bambang dan Wahyudi⁶ yang menyatakan semakin tinggi desentralisasi fiskal mengakibatkan pertumbuhan ekonomi semakin rendah. Alasan tersebut dikarenakan bahwa desentralisasi fiskal pada setiap negara tidaklah sama. Untuk negara berkembang, kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam mengelola sumber pendapatan akan merugikan daerah tu sendiri karena pemanfaatannya tidak optimal.

Pendapatan asli daerah sumber pendapatan daerah yang dihimpun oleh daerah tersebut sesuai dengan UU No.33/2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah.⁷ Pendapatan asli daerah didapatkan dari pajak yang dipungut oleh daerah serta pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Hasil dari pengelolaan pendapatan tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran belanja daerah tersebut. Kegiatan penghimpunan serta pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan tujuan otonomi daerah itu sendiri. Yaitu melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Besaran pendapatan asli daerah tidak akan sama karena sumber-sumber kekayaan daerah berbeda-beda, semakin banyak daerah mengelola dengan baik sumber pendapatannya maka akan semakin banyak pula pendapatan asli

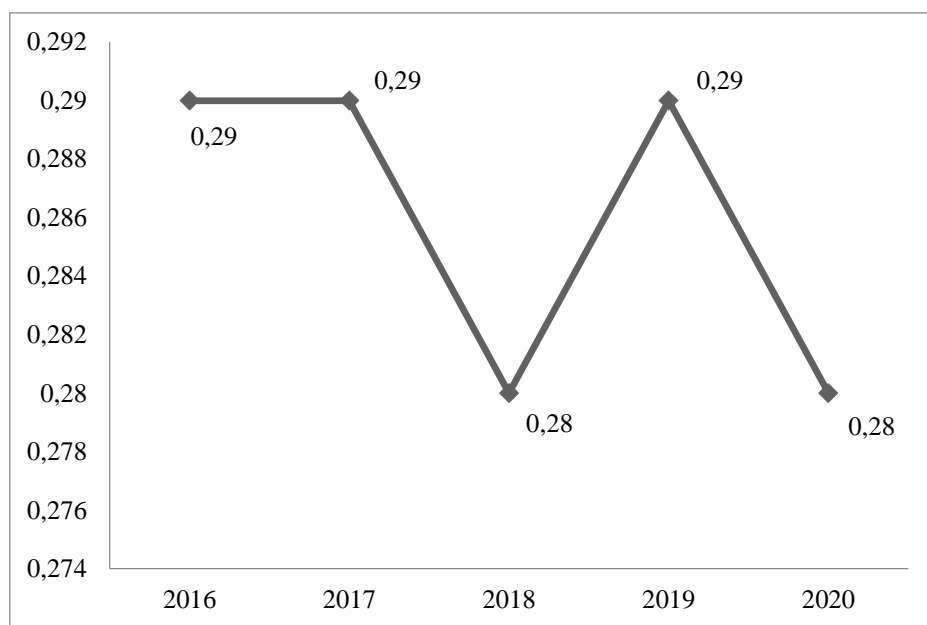
⁶Bambang Saputra and Mahmudi, Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat DI Provinsi Papua Tahun 1997-2013, *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, Vol. 16 Tahun 2012), hal. 193

⁷Mawarni, et.all, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Ekonomi Daerah, *Jurnal Akuntansi*, Vol.2 No.2 tahun 2013, hal. 81

daerah yang didapatkan. Berikut ini adalah grafik pendapatan asli daerah Jawa Timur tahun 2016-2020:

Grafik 1.2

Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPKK), 2021.

Pada grafik 1.2 tentang Pendapatan Asli Jawa Timur Tahun 2016-2020 dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah tertinggi yaitu tahun 2016, 2017, dan 2019 dengan nilai 0,29. Sedangkan untuk pendapatan Asli Daerah terendah pada tahun 2018 dan 2020 yaitu hanya 0,28. Dalam hal pendapatan asli daerah, Jawa Timur dapat dikatakan stabil karena dari grafik yang dihasilkan tidak naik turun. Tingginya pendapatan asli daerah menunjukkan keberhasilan daerah tersebut dalam mengelola sumber-sumber yang dimiliki. Ketika nilai pendapatan asli daerah stagnan, menunjukkan pemerintah daerah perlu mengadakan evaluasi untuk meningkatkan pendapatannya. Sesuai

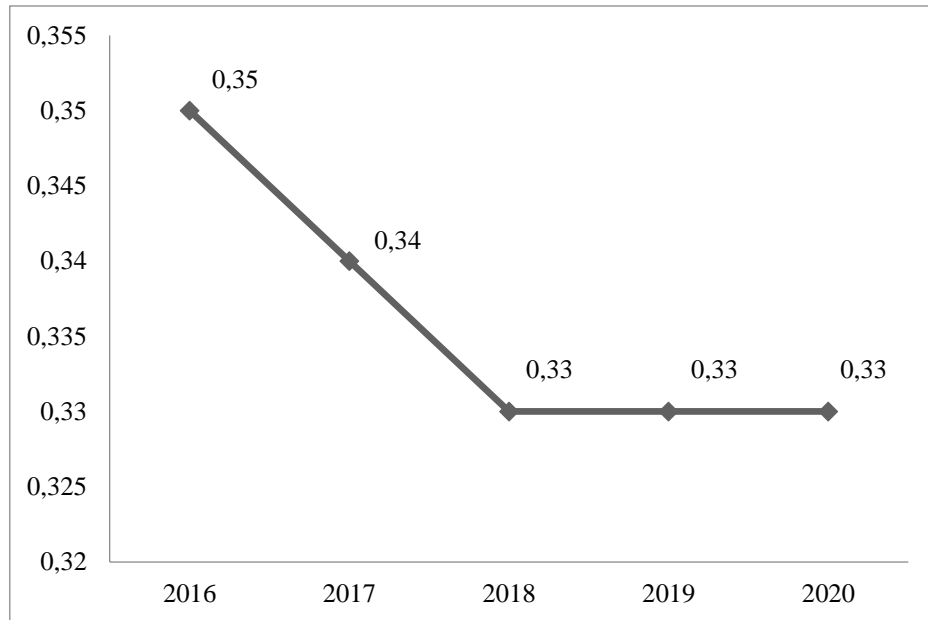
dengan penelitian Aulia⁸ dimana pendapatan asli daerah menunjukkan tingkat kemandirian daerah tersebut, sehingga makin tinggi nilai pendapatan asli daerah akan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula.

Kinerja keuangan daerah merupakan kegiatan yang dilaksanakan daerah dalam hak dan kewajibannya dalam mengelola keuangan yang dimiliki yang dapat diukur dengan uang.⁹ Kinerja keuangan menunjukkan daerah mampu mencapai tujuan serta visi dan misi yang telah dirancang dalam rancangan kerja tahunan. Kinerja yang dimaksud adalah bagaimana hasil kerja yang dilakukan oleh para pekerja pemerintahan daerah sehingga dapat diukur guna menjadi salah satu alat ukur dalam pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah maka menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. berikut ini adalah grafik kinerja keuangan Jawa Timur tahun 2016-2020:

⁸ Aulia Afafun Nisa, Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol.1 tahun 2017, hal. 205

⁹ Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar, "*Kinerja Keuangan Daerah*", dalam <https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/09/07kinerja-keuangan-daerah/>, diakses 10 November 2021

Grafik 1.3
Kinerja Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021.

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan kinerja keuangan Jawa Timur dalam kurun waktu 2016-2020. Kinerja keuangan Jawa Timur mengalami kesetabilan pada tahun 2018-2020 yaitu senilai 0,33 sedangkan yang tertinggi yaitu sebesar 0,35 yaitu pada tahun 2016. Perbedaan nilai kinerja keuangan di Jawa Timur dikarenakan pengelolaan yang dilakukan oleh setiap daerah berbeda, mulai dari sumber pendapatan sampai alokasi pendapatan yang dimiliki. Semakin baik daerah dalam melakukan pengelolaan keuangannya, maka akan mempermudah daerah tersebut dalam mencapai tujuan perkonomian. Penelitian yang dilakukan Sandy, I Wayan, Fridayana,¹⁰

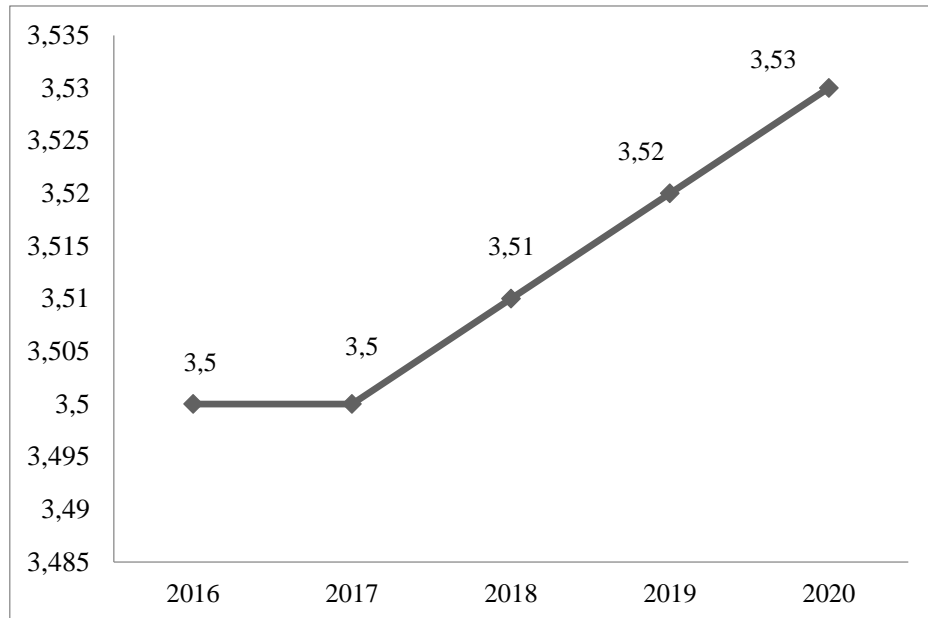
¹⁰ Fridayana Saputra, et.all, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Daerah Di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014, *Bisma: Jurnal Manajemen*, Vol. 4 No. 2Tahun 2018, hal. 138

kinerja keuangan dianggap sebagai tolak ukur dari otonomi daerah sehingga perlu diukur agar dapat mengetahui tingkat keberhasilannya.

Dana alokasi umum yang bersumber dari APBN dengan tujuan untuk pemeratakan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.¹¹ Besaran dana alokasi umum sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Daerah tidak hanya menerima sumber pendapatan dari pengelolaan daerahnya sendiri, akan tetapi juga menerima sumber pendapatan dari negara. Pendapatan asli daerah ini dibagikan secara merata keseluruh provinsi di Jawa Timur dengan besaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan setiap daerahnya. Ketika daerah sudah mendapatkan dana alokasi umum, maka daerah dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kegiatan pembangunan baik infrastruktur atau sarana lainya guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Berikut ini adalah grafik dana alokasi umum Jawa Timur tahun 2016-2020:

¹¹ Mawarni, et.al, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah.....,hal. 82

Grafik 1.4
Rata-Rata Dana Alokasi Umum Pada Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020



Sumber: Direktor Jendral Perimbangan Kementerian Keuangan (DJPKK), 2021.

Berdasarkan grafik 1.4 tentang dana alokasi umum Jawa Timur tahun 2016-2020 diketahui bahwa dana alokasi umum tertinggi yaitu tahun 2020 sedangkan untuk terendah adalah tahun 2016 dan 2017 yaitu sebesar 3,5. Besaran nilai dana alokasi umum tidak sama setiap tahunnya meskipun dialokasikan untuk provinsi yang sama. Hal tersebut dikarenakan bahwa keadaan setiap tahunnya daerah yang ada di Jawa Timur berbeda. Mulai dari pendapatan dan juga alokasi penerimaan serta tujuan yang setiap tahunnya berubah. Meskipun semua hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Menurut penelitian

Sheilla,¹² dana alokasi digunakan untuk pemerataan pembangunan suatu daerah sehingga dapat mengurangi ketimpangan antar masyarakat di daerah tersebut.

Bedasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, peneliti bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal, pendapatan asli daerah, kinerja keuangan, dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi. apakah semakin tinggi nilai variabel bebasnya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada tahun 2016-2020. Pertumbuhan ekonomi dapat diproyeksikan menggunakan variabel bebas dan variabel terikat yang digunakan dalam penelitian. Dengan demikian peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur”** dengan menggunakan 38 kabupaten/kota yang berada di Jawa Timur tahun 2016-2020.

B. Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka langkah selanjutnya adalah perlu diadakannya tentang identifikasi masalah penelitian sehingga penelitian yang dilakukan memiliki ruang

¹² Sheilla Andita Astria, Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Selatan, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Journal of Economic & Development*, Vol.12 No.1 tahun 2014, hlm. 44

lingkup yang cukup jelas. Dalam penelitian ini yang menjadi identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Diperlukannya pengukuran variabel bebas Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum dalam mengukur pertumbuhan ekonomi yang digunakan untuk memperbaiki kinerja pemerintah dimasa yang akan datang yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu dengan evaluasi yang berkala.

C. Rumusan Masalah

Bedasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah desentralisasi fiskal, pendapatan asli daerah, kinerja keuangan daerah, dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kab/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020?

D. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal, pendapatan asli daerah, kinerja keuangan daerah, dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi pada kab/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020

E. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dalam penelitian yang dilakukan bisa bermanfaat serta memiliki nilai tersendiri dibidang pengetahuan:

1. Manfaat Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan hasil akhirnya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya serta dijadikan acuan sebagai bahan rujukan bagi pembaca.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengkaji pertumbuhan ekonomi untuk pemerintah di daerah masing-masing sehingga pemerintah dapat merancang pembangunan di periode selanjutnya.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat berkontribusi terhadap literatur penulisan terkait pertumbuhan ekonomi serta sebagai bentuk sumbangan penelitian dan informasi guna menambah wawasan khususnya bidang Manajemen Keuangan Syariah dan juga digunakan sebagai sumber referensi bacaan.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai tambahan wawasan bagi penelitian selanjutnya, sehingga penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel bebas atau

tahun penelitian dengan adanya penelitian ini maka penelitian selanjutnya akan lebih mudah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh kabupaten atau kota yang terdapat di Jawa Timur tahun 2016-2020 yang berjumlah 38.

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini perlu ada batasan tertentu guna mempermudah melaksanakan penelitian dan hasil dapat akurat karena yang diteliti tidak menyeluruh. Batasannya yaitu hanya fokus pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020.

G. Penegasan Istilah

Bagian ini meliputi definisi konseptual dan definisi operasional, yang dimana definisi konseptual

1. Definisi Konseptual

Menurut Yusra dan Hijri, Pertumbuhan Ekonomi adalah kondisi yang mengindikasikan meningkatnya kemakmuran suatu negara yang ditandai dengan meningkatnya produksi barang atau jasa yang dihasilkan dalam kegiatan perekonomian. Dengan demikian ketika produksi barang dan jasa yang dihasilkan dari perekonomian

meningkat, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sehingga kemakmuran masyarakatnya juga meningkat.¹³

Menurut Adissya dan Budi, Desentralisasi Fiskal adalah alat yang digunakan dalam kegiatan pengambilan keputusan publik menjadi yang lebih baik dengan menggunakan hal serta menciptakan pelayanan publik yang memuaskan.¹⁴

Menurut Muhammad Safar, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan dana yang didapatkan pemerintah daerah dari pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang nantinya digunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah guna memperlancar kegiatan ekonomi. jasi pendapatan asli daerah berbanding lurus dengan perlumbuhan ekonomi suatu daerah.

Menurut Keren Debora, Kinerja Keuangan Daerah adalah kegiatan suatu daerah dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber-sumber asli keuangan daerah sebagai sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah baik dengan meningkatkan

¹³ Yusra Mahzalena, Pengaruh Inflasi, Pengeluaran Pemerintah Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, Vol. 02 tahun 2019, hal. 39

¹⁴ Budi Ispriyarso Adissya Mega Christia, Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Vol. 15, tahun 2019, Hal. 151

pelayanan terhadap masyarakat, pembanguna sarana dan prasarana, serta mendukung berjalanya sistem pemerintahan.¹⁵

Menurut Syofyan, Dana Alokasi Umum adalah dana yang digunakan untuk pemeratakan keuangan suatu daerah yang berasal dari APBN. Penggunaan dana alokasi umum dapat untuk memebuh kebutuhan pemrintahan suatu daerah dengan tujuan untuk tercapanya desentralisasi.¹⁶

2. Definisi Operasional

Definisi Operasional yang dimaksud “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum, Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020.

H. Sistematika Skripsi

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang gambaran dari isi proposal dengan komprerensif dan sistematis, meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

¹⁵ Keren Debora and others, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kota Manado, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol.20 No.02 tahun 2020), hal. 33

¹⁶ Syofyan Yuliantoni and Fefri Indra Arza, Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Periode 2015-2019, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol.3 No.1 tahun 2021, ha., 87

Pada pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang masalah peneliti mengambil sebuah penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, sistematika skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menguraikan tentang pembahasan variabel-variabel penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini didalamnya berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, disamping itu juga membahas mengenai populasi, sampling dan sampel penelitian. Lalu terdapat sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrument penelitian, serta analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

Timur serta membahas mengenai pengujian hipotesis penelitian.

BAB V : PEMBAHASAN

Pembahasan yang mencakup pengaruh desentralisasi fiskal, pendapatan asli daerah, kinerja keuangan, dana alokasi umum, terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan serta saran-saran yang relevan, pada bagian akhir laporan ini berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, data informasi penunjang penelitian, surat-surat dan daftar riwayat hidup peneliti.